

Komisi C Segera Panggil

Dinas PU Kalbar

EQuator

Kamis, 21 Juli 2011

PONTIANAK. Komisi C DPRD Kalbar akan mencari tahu dugaan penyimpangan pada tender 27 paket proyek APBN 2011 dengan pagu dana Rp686.831.357.000 yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin di Kalbar.

"Dalam waktu dekat kita akan rapat dengan Dinas PU Kalbar. Kita akan undang Pak Satrio (Ir Satrio Sugeng P, red) Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kalbar. Kalau perlu Pak Subagyo (Ir Subagyo, red) Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga kita panggil," tegas HM Ali Akbar AS SH, Anggota Komisi C DPRD Kalbar, kemarin.

Dikatakan Ali, tujuan rapat, meminta keterangan dari Dinas PU Kalbar dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ban-

jarmasin atas tudingan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar yang mengatakan, proyek tersebut sudah diatur. Bahkan ada pertemuan gelap yang mengatur pemenang tender proyek. Seolah-olah proyek yang pagu dananya rata-rata puluhan miliar perpaketnya terkesan main tunjuk. "Sudah menjadi kewajiban kita Komisi C untuk mencari tahu kebenaran tudingan LPJKD tersebut," tegas Ali.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap tudingan LPJKD Kalbar bukan mengacu pada sentimen karena tidak mendapatkan proyek tersebut. Ali mengharapkan, tudingan LPJKD tersebut diperkuat dengan bukti-bukti yang jelas.

"Saya belum tahu pasti apakah tudingan LPJKD tersebut benar. Tapi ini mega proyek, tentunya pelaksanaan tendernya tidak bo-

leh main-main.

Apalagi uang negara yang terserap dalam mega proyek tersebut di atas setengah triliun rupiah," papar Ali.

Ali berharap tudingan LPJKD Kalbar yang mengatakan proyek APBN tersebut sudah diatur pemenangnya tersebut tidak benar. Namun, apabila tudingan tersebut benar, maka Komisi C akan memberikan rekomendasi kepada BPK-RI dan aparat hukum untuk melakukan audit dan memproses hukum mereka yang terlibat.

"Kita tidak main-main dalam masalah ini. Kalbar ini infrastruktur jalan dan jembatan sangat hancur. Kita tidak mau dana APBN ini disia-siakan, apalagi diselewengkan," tegas Ali lagi.

Berita sebelumnya, LPJKD Kalbar mencium aroma tak sedap pada proses pelelangan mega proyek APBN 2011 di Kalbar.

Lembaga tersebut menduga, adanya pertemuan gelap yang dilakukan pejabat berkompeten dengan perusahaan konstruksi dalam menentukan pemenang lelang.

"Proyek APBN yang dikelola Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin di Kalbar sudah bermasalah sejak awal pelelangan. Ada aroma pengaturan yang sistematis dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII," ungkap Ir H Bambang Widiyanto, Ketua LPJKD Kalbar, Kamis (30/6) lalu. Dikatakan Bambang, bahkan sebelum pelelangan dilakukan, dirinya sudah mengetahui siapa pemenang paket-paket mega proyek dari dana APBN 2011 tersebut. Aroma pengaturan pemenang tercium setelah adanya beberapa kali pertemuan antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang diarahkan.

"Pertemuan berlangsung pada saat proses lelang berlangsung. Saat itu belum ada pemenangnya. Hasilnya terlihat setelah ada pengumuman," paparnya.

Proses lelang yang diduga bermasalah tersebut terdiri dari 27 paket proyek pengerjaan jalan dan jembatan. Pagu dana keseluruhan Rp686.831.357.000.

Bambang mengaku telah melapor ke Mabes Polri atas dugaan penyimpangan proses lelang dari 27 paket mega proyek di Kalbar tersebut. Diantaranya paket Pelebaran Jal

an Tebilian-Nanga Pinoh sebesar Rp50 miliar, Pelebaran Jalan Batas Kota Sanggau-Sekadau juga Rp50 miliar. Selain itu paket Peningkatan Struktur Jalan Nanga Tayap-Batas Provinsi Kalimantan Tengah dengan pagu dana Rp73.416.460.000 dan Pelebaran Jalan Tanah Hitam/Tanjung Hara-

pan-Sambas Rp25 miliar.

"Kami minta pihak kepolisian menindaklanjuti laporan kami. Karena aroma pengaturan pemenang tender sangat kental," tegas Bambang.

Dikatakannya, apabila dilihat dari dokumen lelang dan hasil pelelangan, lelang proyek dimenangkan perusahaan-perusahaan yang sering ikut dalam pertemuan. Alasan lainnya, penawaran pemenang lelang mendekati pagu dana.

Sementara perusahaan yang menawar dan menguntungkan negara digugurkan. "Alasan digugurkannya perusahaan tersebut, sengaja dibuat-buat dan sama sekali tidak mengacu Perpres Nomor 5/2010," ungkapnya.

Dicontohkan Bambang, syarat perusahaan ikut tender harus memiliki sertifikat kelayakan operasi untuk Asphalt Mixing Plant

(AMP). Padahal ketentuan tentang keharusan memiliki sertifikat AMP sengaja dibuat-buat, agar bisa menggugurkan perusahaan lain yang tidak diarahkan dalam pertemuan gelap.

"Di sini yang bermain adalah kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII. Karena sertifikat AMP diterbitkan oleh kepala Balai. Mestinya sertifikat tersebut diterbitkan oleh Departemen PU.

Jadi kepala balai menerbitkan sertifikat perusahaan yang telah ditunjuk dalam memenangkan lelang.

Dalam proses pelelangan, kepala balai yang membuat aturan, dia juga yang menerbitkan sertifikat AMP, kemudian dia juga yang menentukan pemenang lelang. Info yang kita dapat, dalam penerbitan sertifikat penuh dengan rekayasa," ungkap Bambang. (amk)